

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Ariefsetya Darmawan

No Mahasiswa : 14312060

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Ariefsetya Darmawan

No Mahasiswa : 14312060

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 April 2018

METERAI
TEMPEL
AFB03AEF980003450
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis,

(Ariefsetya Darmawan)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Ariefsetya Darmawan
No Mahasiswa: 14312060

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing

Pada Tanggal.....16/2018.....
/4

Dosen Pembimbing



(Johan Arifin.,S.E.,M.Si.,Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

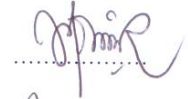
SKRIPSI BERJUDUL
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Disusun Oleh : **ARIEFSETYA DARMAWAN**
Nomor Mahasiswa : **14312060**

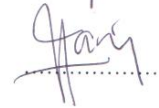
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 21 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.



Penguji : Marfuah, Dra.,M.Si.,Ak,Cert.SAP.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.”

(Q.S Al Baqarah :153)

“Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”

(QS Al Baqarah:155)

“ Tuhan tidak mewajibkan kita menang, sehingga kalahpun bukan dosa, yang terpenting adalah berjuang atau tidak.”

(Emha Ainun Najib)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS Al-Insyirah: 5-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Ya Allah, skripsi ini aku persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta

Sugeng Wadana Mulya dan Sulastri

Yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam pengerjaan

skripsi sampai skripsi ini bisa selesai.

Buat kakek dan Nenek tercinta

Basir Mardi Sutrisno (Mbah kakung), **Sugirah** (mbah putri), **Wuki**

(mbok tuwo) dan **Alm Kamto Diyono** (Pak Kamto)

Yang memberikan dukungan, doa dan semangat berkali lipat sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Serta sahabat dan teman-temanku dengan segala bentuk doa dan

dukungannya yang tiada henytinya dan membuatku semangat untuk

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam hal-hal kebaikan

(alay yoben raseneng/ratrimo yowis aku kok)

KATA PENGANTAR



Assalamu'aliakum Wr. Wb.

Alhamdulillahil'alaahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten .Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan memberikan petunjuk dan karunia-Nya serta melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Amin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. D. Agus Sarjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, Drs, S.Si, M.Com, Ph.D, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin.,S.E.,M.Si.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang selalu

memberikan bimbingan, nasihat dan saran, serta inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
9. Bapak tercinta Sugeng Wadana Mulya dan Ibu tercinta Sulastri yang telah mengasuh dan mendidikku dengan sepenuh rasa kasih sayangnya. Beliau mendoakan, memberi dukungan dan harapan, serta mengajarkanku tentang arti hidup yang sebenarnya dan yang memperlihatkan ku betapa luasnya cakrawala dunia dan selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil.
10. Keluarga besar Basir Mardi Sutrisno dan Kamto Diyono untuk segala bentuk semangat, doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita.
11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kulon Progo (IMKP) yang telah mengisi dunia perkuliahan saya.
12. Teman-teman HMI MPO FE UII yang telah mengisi dunia perkuliahan saya.
13. Keluarga besar SLEMAN CAMPUS BOYS yang telah menjadi keluarga kedua saya terimakasih telah membantu mewarnai hidup ini, Semoga tahun ini PSS SLEMAN Juara dan lolos LIGA 1. Aamiin
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Fahmi, Aris, Evel, Ihan, Ira, Ninu dan lainnya. Semoga di waktu yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang lebih baik.
15. Keluarga Kos Ijo Royo-Royo "Pak Purnomo" untuk semua kebersamaan dan kekompakannya.
16. Teman-teman KKN angkatan 55 unit 19. Terimakasih atas pertemuan, pelajaran, pengalaman dan kebersamaannya.
17. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.

18. Pegawai BKAD Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo dan BPKAD Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
19. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka atas semua keikhlasan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran ke arah perbaikan sangat diperlukan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Halaman Berita Acara.....	v
Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 LANDASAN TEORI.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teori).....	12
2.1.2 Laporan Keuangan.....	13
2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan	13
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan	13
2.1.5 Sumber Daya Manusia.....	15
2.1.6 Pengendalian Internal	17
2.1.7 Standar Akuntansi Pemerintah	20
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	25
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	30

2.3.1 Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	30
2.3.2 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
2.3.3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32
2.4 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 POPULASI DAN SAMPEL	35
3.2 VARIABEL PENELITIAN	36
3.2.1 Variabel Dependen	36
3.2.2 Variabel Independen	36
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA.....	38
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA.....	38
3.4.1 Uji Riabilitas.....	38
3.4.2 Uji Validitas.....	39
3.5 Statistik Deskriptif	40
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.6.1 Uji Normalitas	40
3.6.2 Uji Multikolinearitas.....	40
3.6.3 Uji Heteroskedatisitas	41
3.7 Analisis Linear Berganda.....	41
3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
3.7.2 Uji t	43
BAB IV	44
ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Persebaran Kuesioner.....	44
4.2 Gambaran Umum Responden	45
4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.2.2 Responden Berdasarkan Usia	45

4.2.3 Responden berdasarkan Pendidikan	46
4.3 Uji Data Penelitian	47
4.3.1 Hasil Uji Validitas	47
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	49
4.4 Uji Asumsi Klasik	51
4.4.1 Analisis Regresi Berganda.....	54
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 KESIMPULAN	65
5.2 Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
Lampiran 1 : Surat Perizinan Dinas.....	70
Lampiran 2: Operasionalisasi Variabel.....	75
Lampiran 3 : Kuisisioner.....	79
Lampiran 4 : Tabulasi data.....	87
Lampiran 5 : Reliabilitas dan Validitas.....	89

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian Kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi DIY dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan SPSS 22. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintahan dalam penentuan kebijakan terkait kualitas laporan keuangan pememerintah daerah.

Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstract

This study has purposed to analyze the effect of human resource competency, internal control system and government accounting standards to the quality of regions government financial report (LKPD) District / City in Province of Special Region of Yogyakarta. This study uses quantitative research through questionnaire. The data are collected from the employee of the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) in the District / City in Province of Special Region of Yogyakarta using purposive sampling method. The data is processed by using SPSS version 22. The statistical method that is used this reasearch to test the hypothesis is multiple linear regression. The result of hypothesis testing shows that human resource competency, internal control system and government accounting standard have a positive significant effect on quality of regions government financial report. Thereby the local government should consider the human resources competency, internal control system, government accounting standards in policy determination of the quality of regional government financial report.

Keywords: Quality of Financial Report, Human Resource Competency, Internal Control System, Government Accounting Standard

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses akuntansi atau tata keuangan saat ini telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Perkembangan dan perubahan akuntansi sebagai bagian dari proses sosial yang tidak bisa dipisahkan karena budaya suatu bangsa merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi dan perubahan akuntansi disuatu negara (Mardiasmo 2006).

Fenomena perkembangan akuntansi pemerintah telah terjadi sejak jaman Kerajaan Mesir Kuno dan kerajaan Mesopotamia (Mardiasmo 2006). Pada waktu itu digunakan sebagai pencatatan pajak dan dibuktikan dengan penemuan catatan akuntansi pada lempengan tanah. Dalam perkembangannya akuntansi bisnis berkembang lebih pesat dibanding akuntansi pemerintah. Indonesia termasuk negara yang tergolong lamban dalam perkembangan akuntansi pemerintah(Mardiasmo 2006). Perkembangan signifikan baru terjadi pada tahun 2000-an yaitu sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo 2006). Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga baik pusat maupun

daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo 2005).

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahannya. Dengan penerapan sistem tersebut maka masing-masing daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, serta dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Sukmaningrum 2012). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003,

pasal 32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah di haruskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungJawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komponen lap oran keunagn yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatatan atas Laporan Keuangan (Mahmudi 2011).

Laporan keuangan pemerintah bermanfaat memberikan informasi bagi *stakeholder* yang diapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Menurut (Suwarjono 2014) informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai.

Govemmental Accounting Standard Board (1999) dalam *concepts statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaanya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dikatakan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidakefektifan (Sukmaningrum 2012).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap informasi ataupun nilai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan

keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait tingkat kewajaran dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah telah memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Untuk memperoleh opini WTP dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti- bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual sebagai masa transisi menuju akuntansi berbasis akrual penuh yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang

mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.

Menurut Ramanda (2015) penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Akuntansi basis akrual diyakini juga dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Pengendalian Intern (SPI). Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia. Menurut Sukmaningrum (2012) Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari

itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi DIY terhadap LKPD untuk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2012 sampai dengan 2016 tergolong baik. Pada tahun 2012 Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta memperoleh Opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul memperoleh Opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul serta Kota Yogyakarta memperoleh opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan Kabupaten Gunung kidul memperoleh Opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2015 dan 2016 hasil audit BPK terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kabupaten / Kota dari Provinsi DIY yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta memperoleh opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian (BPKP, 2017).

Hasil audit BPKP DIY Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2012-2016 menyimpulkan bahwa ada peningkatan kualitas LKPD setiap tahunnya hal ini dukung dengan ditahun 2015 dan 2016 semua kabupaten/kota memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini membuktikan adanya keseriusan Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melihat hasil audit bahwa Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta selama lima tahun berturut turut memperoleh Opini WTP. Kabupaten Kulon Progo baru memperoleh opini WTP mulai tahun 2013, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul baru memperoleh opini WTP pada tahun 2014. Hal ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor yang sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.

Studi penelitian ini pada dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdapat di Kabupaten/ Kota Provinsi DIY. Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang mayoritas subyek penelitian di SKPD satu Kabupaten/ Kota. Sedangkan penelitian ini meliputi satu provinsi yang terdiri dari berbagai Kabupaten/ Kota. Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten /kota yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari BKAD Kabupaten Gunung Kidul, BKAD Kabupaten Kulon Progo, BKAD Kabupaten Sleman, BKAD Kabupaten Bantul dan BPKAD Kota Yogyakarta. Penelitian ini didasarkan pertimbangan tugas pokok BKAD adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Di dalam fungsinya BKAD melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah, dalam hal ini membantu bupati dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu proses penyusunan laporan keuangan daerah adalah melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD yang ada dilingkup kabupaten/Kota dan menghasilkan output berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk memasukan tiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang diduga faktor faktor tersebut mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Apakah kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemeriantah daerah ?
2. Apakah Sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemeriantah daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian

sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi akademisi penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bagian tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang mendasari penelitian ini dan menjadi acuan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan bagian pembahasan , yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V :Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teori)

Menurut Zimmerman (1997) *agency problem* juga terdapat dalam organisasi pemerintah. Dalam hal ini rakyat sebagai principal yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan. Menurut (Mardiasmo 2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai pemegang mandat (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporakan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberi mandat (Principal) yang memiliki hak untuk mendapat pertanggungjawaban. Terdapat dua macam akuntabilitas publik, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horional).

Dalam prakteknya pelaporan keuangan pada pemerintah daerah didasari teori keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat sebagai informasi bagi para pengguna / *stake holder*, dalam hal ini bertindak sebagai prinsipal yang berhak menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, politik berdasarkan informasi tersebut. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin 2011).

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan akuntansi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan sebagai informasi. Laporan keuangan pemerintah ditunjukkan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2011) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria dan unsur- unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu :

a. Relevan,

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*), serta informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk pengambilan keputusan (*timeliness*)

b. *Reliable* / Andal

Keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan berbadan tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

1. Dapat diverifikasi (*verifiable*)

Suatu informasi diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

3. Penyajian secara wajar (*representation faithfulness*)

Menggaambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami.

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik

mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi 2005). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Ketrampilan

Ketrampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan dalam

memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap

Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo 2005).

2.1.6 Pengendalian Internal

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di dalam (Sukmaningrum 2012) Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi :

1. Pengendalian umum, meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.
2. Pengendalian aplikasi, meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan data dan file data.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan Laporan Keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur SPIP menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan diberbagai negara yang meliputi.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel

organisasi mengenai pengendalian. Lingkungan menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 pengendalian meliputi :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang baik

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengelola berbagai risiko dalam organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian risiko menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

3. Kegiatan pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

- b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas aset
 - e. Pemisahan fungsi
 - f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
 - h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan

Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

2.1.7 Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada BAB VII mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD pasal 32 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bentuk dan Isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
- (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Standar akuntansi pemerintahan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu :

- 1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan standar ini memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basisi kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar LRA (Laporan realisasi anggaran) adalah menyediakan informasi mengenai realiasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar LAK (laporan arus kas) adalah mengatur penyajian arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan memgklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pelaporan arus kas memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4) PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat berpotensi mengandung kesalahpahaman informasi diantara pembacanya, sehingga dalam laporan keuangan dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Pernyataan standar akuntansi persediaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

6) PSAP No 06 Akuntansi Investasi

Pernyataan standar akuntansi investasi untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Investasi pemerintah dibagi menjadi dua macam yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

7) PSAP No 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi klasifikasi, pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa

aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam rangka keonseptual akuntansi pemerintahan.

8) PSAP No 08 Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk (a) indentifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi pengerjaan; (b)penetapan besarnya biaya yang dapat dikapitalisasi dan disajikan dineraca; (c) penetapan berbasis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9) PSAP No 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar akuntansi kewajiban untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban. Kewajiban timbul karena adanya konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari tindakan masa lalu.

10) PSAP No 10 Koreksi Kesalahan

Tujuan pernyataan standar koreksi kesalahan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Laporan keuangan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa suatu entitas harus disusun dan disajikan dengan menerapkan pernyataan standar ini.

11) PSAP No 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12) PSAP No 12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terceminikan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian di Indonesia tentang kualitas laporan keuangan diantaranya Mahaputra dan Putra (2014); Indriasari dan Nahartyo (2008); Nugraheni dan Subaweh (2008); Winidyaningrum (2009); Sukmaningrum (2012); (Desianawati, Herawati, dan Sinarwati 2014) dan lainnya.

Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan.

Nugraheni dan Subaweh (2008) meneliti pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Winidyaningrum (2009) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan dan ketepatanwaktuan.

Sukmaningrum (2012) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif.

Mahaputra dan Putra (2014) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia,

sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.

Desianawati, Herawati, dan Sinarwati (2014) meneliti pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dapat dilihat pada ringkasan dalam Tabel 2. 1 berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
(Indriasari dan Nahartyo 2008)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota da Palembang dan kabupaten ogan ilir)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda , sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian interen akuntansi	kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan
(Nugraheni dan Subaweh 2008)	Pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Kualitas laporan keuangan, penerapan SAP	standar akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
(Winidyaningrum 2009)	Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian interen akuntansi	Keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda, sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan dan ketepatanwaktuan.

(Sukmaningrum 2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah	Kualitas informasi laporan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif.
Mahaputra dan putra (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan daerah	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah	Kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.
Desianawati (2014)	Pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kualitas informasi laporan keuangan pemda, kompetensi SDM, SAP, SAKD	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Mahaputra dan Putra (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Bukti penelitian ini didukung hasil penelitian (Desianawati,

Herawati, dan Sinarwati 2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indriasari dan Nahartyo 2008) kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dan penelitian dari (Sukmaningrum, 2012) kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian (Winidyaningrum 2009) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 1 sebagai berikut :

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tugas yang jelas,

pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian (Indriasari dan Nahartyo 2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmaningrum 2012) dan (Mahaputra dan Putra 2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 2 sebagai berikut :

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat

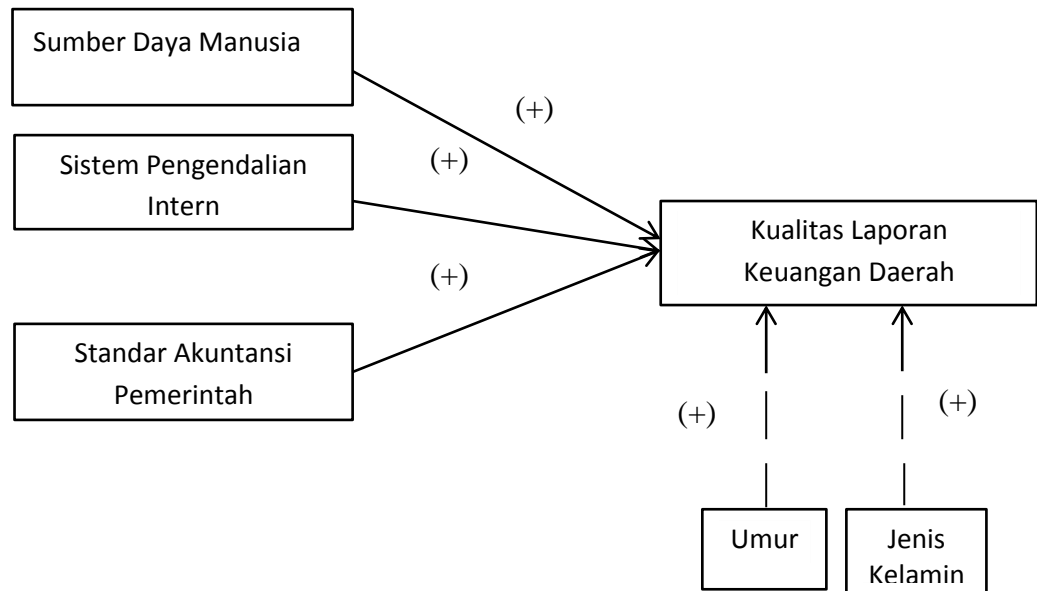
SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Nugraheni dan Subaweh (2008) dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahaputra dan Putra 2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 3 sebagai berikut :

H3 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi penelitian adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DIY terhadap lima BKAD dari lima kabupaten/kota. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang memahami dan mengetahui tentang laporan keuangan atau bekerja pada bidang keuangan. Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten /kota yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari BKAD Kabupaten Gunung Kidul, BKAD Kabupaten Kulon Progo, BKAD Kabupaten Sleman, BKAD Kabupaten Bantul dan BPKAD Kota Yogyakarta. Penelitian ini didasarkan pertimbangan tugas pokok BKAD adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Di dalam fungsinya BKAD melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah, dalam hal ini membantu bupati dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu proses penyusunan laporan keuangan daerah adalah melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD yang ada dilingkup kabupaten/Kota dan menghasilkan output berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2 VARIABEL PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh independen variabel, sedangkan variabel independen adalah variabel bebas adalah yang mempengaruhi variabel dependen.

3.2.1 Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahn menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya. Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 2015). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) Sangat Setuju.

3.2.2 Variabel Independen

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung dialam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Variabel kompetensi sumber daya manusia menggunakan 3 indikator yaitu pengetahuan dan ketrampilan dan perilaku.

Variabel sumber daya manusia diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 2015). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) “sangat tidak setuju” hingga (5) “sangat setuju”.

2. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian Intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 4 indikator menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 2015). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) “Sangat Setuju”.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai prinsip – prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk membuat laporan keuangan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Indikator dalam penelitian ini adalah 11 Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yaitu : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, PSAP 11 Laporan Konsolidasi. Variabel standar akuntansi pemerintahan diukur pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 200) Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (5) “ Sangat Setuju”.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan untuk proses analisis. Pengumpulan data melalui kuisioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAP). Informasi tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi DIY. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung dalam kurun waktu 3 Minggu.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

3.4.1 Uji Riabilitas

Riabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu apabila fenome

yang diukur tidak berubah (Harison, dalam Zulganef 2006). Menurut Azwar (2006) reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.

Untuk menguji reabilitas kuesioner menggunakan teknik *cronbach Alpa*. Menurut Nunaly (1960) dalam (Ghozali 2011) mengatakan pada umumnya konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach Alpa* lebih besar dari 0,60.

3.4.2 Uji Validitas

Validitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan suatu instrumen. Kesahihan suatu alat ukur merupakan kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Suatu instrumen yang sah mempunyai validitas yang tinggi yang berarti alat ukur yang digunakan sudah tepat. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar (Sukmaningrum 2012).

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner terhadap total skor. Apabila korelasi antara masing-masing item pertanyaan dengan total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

3.5 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran dan deskripsi mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah rata-rata (mean), median dan standar deviasi.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa data yang diolah dalam penelitian tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Jika data yang ada tidak terdapat adanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas maka asumsi klasik telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan menurut (Ghozali 2011).

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual memiliki distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali 2011).

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dan independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) (Ghozali 2011)

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2011). Apabila residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada di atas serta di bawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara lain untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan metode uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residualnya terhadap variabel independen (Ghozali 2011).

3.7 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel

dependen (Ghozali 2011). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = konstanta

β_1 = Koefisien regresi Sumber Daya Manusia

β_2 = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern

β_3 = Koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintahan

β_4 = Koefisien Regresi Jenis kelamin

β_5 = Koefisien Regresi Umur

X_1 = Variabel Sumber Daya Manusia

X_2 = Variabel Sistem Pengendalian Interen

X_3 = Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

X_4 = Variabel Kontrol Jenis Kelamin

X_5 = Variabel Kontrol Umur

e = variabel pengganggu

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2011). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien

determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali 2011). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan dengan kriteria apabila probabilitas t hitung lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dan apabila probabilitas t hitung kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan analisis penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner. Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

4.1 Persebaran Kuesioner

Dalam penelitian ini, jumlah total kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. Dari total kuesioner tersebut, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 92 kuesioner. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 80 kuesioner yang layak digunakan. Berikut ini terdapat tabel penyebaran kuesioner pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1
Penyebaran Kuesioner

Kabupaten/Kota	Sebar	Kembali	Layak Digunakan
Kabupaten Sleman	20	18	16
Kabupaten Bantul	20	20	17
Kabupaten Kulon Progo	20	18	15
Kabupaten Gunung Kidul	20	16	14
Kota Yogyakarta	20	20	18
TOTAL	100	92	80

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 80 responden diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	31	38,8
Wanita	49	61,2
Total	80	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi dua kategori yaitu pria dan wanita. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden pria sebanyak 31 atau 38,8% dan wanita sebanyak 49 atau 61,2%. Hal ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah wanita dengan jumlah 61,2%.

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 80 responden diperoleh data tentang usia responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan usia ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3.
Responden Berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
21-25 tahun	3	3,8
26-30 tahun	10	12,5
31-35 tahun	12	15,0
36-40 tahun	15	18,8
41-45 tahun	15	18,8
46-50 tahun	14	17,5
51-55 tahun	8	10,0
56-60 tahun	3	3,8
Total	80	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi delapan kategori yaitu 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, 51-55 tahun dan 56-60 tahun. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data 21-25 tahun sebanyak 3 orang, 26-30 tahun sebanyak 10 orang, 31-35 tahun sebanyak 12 orang, 36-40 tahun sebanyak 15 orang, 41-45 tahun sebanyak 15 orang, 46-50 tahun sebanyak 14 orang, 51-55 tahun sebanyak 8 orang dan 56-60 tahun sebanyak 3 orang. Hal ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah 36-40 tahun dan 41-45 tahun sebanyak 18,8%.

4.2.3 Responden berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 80 responden diperoleh data tentang pendidikan. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan umur perusahaan ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SLTA	9	11,3
D3	5	6,3
S1	59	73,8
S2	7	8,8
Total	80	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi empat kategori yaitu SLTA, D3, S1 dan S2. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data umur perusahaan SLTA sebanyak 9 atau 11,3%, D3 sebanyak 5 atau 6,3%, S1 sebanyak 59 atau 73,8%, S2 sebanyak 7 atau 8,8%.

4.3 Uji Data Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji validitas dengan metode *Pearson Correlation* dapat dilihat Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Item 1	0,742	0,22	Valid
	Item 2	0,685	0,22	Valid
	Item 3	0,656	0,22	Valid
	Item 4	0,709	0,22	Valid
	Item 5	0,813	0,22	Valid
	Item 6	0,724	0,22	Valid
	Item 7	0,758	0,22	Valid
	Item 8	0,584	0,22	Valid
	Item 9	0,760	0,22	Valid
	Item 10	0,765	0,22	Valid
	Item 11	0,749	0,22	Valid
	Item 12	0,687	0,22	Valid
	Item 13	0,781	0,22	Valid
Sumber Daya Manusia	Item 1	0,409	0,22	Valid
	Item 2	0,667	0,22	Valid
	Item 3	0,664	0,22	Valid
	Item 4	0,734	0,22	Valid
	Item 5	0,762	0,22	Valid
	Item 6	0,726	0,22	Valid
	Item 7	0,558	0,22	Valid
	Item 8	0,630	0,22	Valid
	Item 9	0,633	0,22	Valid
	Item 10	0,640	0,22	Valid
Sistem Pengendalian Intern	Item 1	0,653	0,22	Valid
	Item 2	0,404	0,22	Valid
	Item 3	0,711	0,22	Valid
	Item 4	0,576	0,22	Valid
	Item 5	0,480	0,22	Valid
	Item 6	0,629	0,22	Valid
	Item 7	0,684	0,22	Valid
	Item 8	0,650	0,22	Valid
	Item 9	0,437	0,22	Valid
	Item 10	0,580	0,22	Valid
	Item 11	0,465	0,22	Valid
	Item 12	0,618	0,22	Valid

	Item 13	0,638	0,22	Valid
	Item 14	0,673	0,22	Valid
	Item 15	0,742	0,22	Valid
	Item 16	0,688	0,22	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	Item 1	0,653	0,22	Valid
	Item 2	0,605	0,22	Valid
	Item 3	0,716	0,22	Valid
	Item 4	0,559	0,22	Valid
	Item 5	0,721	0,22	Valid
	Item 6	0,686	0,22	Valid
	Item 7	0,677	0,22	Valid
	Item 8	0,683	0,22	Valid
	Item 9	0,640	0,22	Valid
	Item 10	0,670	0,22	Valid
	Item 11	0,682	0,22	Valid
	Item 12	0,645	0,22	Valid
	Item 13	0,566	0,22	Valid
	Item 14	0,681	0,22	Valid
	Item 15	0,586	0,22	Valid
	Item 16	0,677	0,22	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2018

Seperti telah dikemukakan pada Tabel 4.6 diperoleh nilai r_{hitung} dari semua item pada validitas $> r_{tabel}$, maka butir-butir instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan daerah dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin Setuju koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas

dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's *Alpha* instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih kecil 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliable*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>AlphaCronbach</i>	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,768	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,719	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,689	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,703	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diperoleh nilai nilai *AlphaCronbach* dari semua variabel penelitian yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga kuesioner reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari gejala multikolieneritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi tidak dilakukan dikarenakan data yang digunakan bukan data *time series*.

4.3.1 Pengujian Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan cara analisis plot grafik histogram dan uji *kolmogorov-smirnov* (uji K-S). Hasil uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,63708492
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,719
Asymp. Sig. (2-tailed)		,680

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,680. Dikarenakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,680 > 0,05$), maka H_0 diterima; yang berarti data terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya tolerance value dan besarnya VIF (Ghozali, 2005). Jika nilai tolerance value $> 0,10$ atau < 1 dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
SDM	0,638	1,567	Tidak ada multikolinearitas
SPI	0,640	1,562	Tidak ada multikolinearitas
PSAP	0,535	1,869	Tidak ada multikolinearitas
UMUR	0,918	1,090	Tidak ada multikolinearitas
JK	0,869	1,151	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Hasi 1 Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah < 10 . Dengan nilai VIF dari sumber daya manusia sebesar 1,567; nilai VIF dari sistem pengendalian intern sebesar 1,562; nilai VIF dari standar akuntansi pemerintah sebesar 1,869; nilai VIF dari umur sebesar 1,090; dan nilai VIF dari jenis kelamin sebesar 1,151. Sedangkan untuk nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau < 1 dengan nilai *Tolerance* dari sumber daya manusia sebesar 0,638; nilai *Tolerance* dari sistem pengendalian intern sebesar 0,640; nilai *Tolerance* dari standar akuntansi pemerintah sebesar 0,535; nilai *Tolerance* dari umur sebesar 0,918; dan nilai *Tolerance* dari jenis kelamin sebesar 0,869. Jadi berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai uji glejser.

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,668	3,286		,812	,419
	SDM	,085	,051	,238	1,685	,096
	SPI	,001	,043	,002	,017	,986
	PSAP	-,057	,041	-,214	-1,384	,170
	Umur	,018	,031	,068	,579	,564
	JK	-,170	,533	-,039	-,318	,752

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji heteroskedastisitas diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sumber daya manusia sebesar 0,096, sistem pengendalian intern sebesar 0,986, standar akuntansi pemerintah sebesar 0,170, umur sebesar 0,564 dan jenis kelamin sebesar 0,752. Nilai ini lebih besar dari α (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.4 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari strategi inovasi yang mencakup sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian intern (X2), standar

akuntansi pemerintah (X3) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	12,481	5,489		2,274	0,026
SDM	0,266	0,084	0,319	3,154	0,002
SPI	0,264	0,072	0,367	3,641	0,001
PSAP	0,138	0,068	0,223	2,02	0,047
UMUR	0,117	0,051	0,192	2,278	0,026
JK	1,356	0,891	0,132	1,522	0,132

Sumber : Hasil olah data, 2018

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah $Y_{\text{kualitas LKPD}} = 12,481 + 0,266X_1 + 0,264X_2 + 0,138X_3 + 0,117X_4 + 1,356X_5$

Dari persamaan regresi diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia (X1) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y), terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern (X2) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y), terdapat hubungan positif antara standar akuntansi pemerintah (X3) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y), terdapat hubungan positif anatar umur (X4) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y) dan terdapat

hubungan positif antara jenis kelamain (X_3) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y).

4.5.3 Pengujian Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t-test dapat ditunjukkan pada Tabel berikut. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	12,481	5,489		2,274	0,026
SDM	0,266	0,084	0,319	3,154	0,002
SPI	0,264	0,072	0,367	3,641	0,001
PSAP	0,138	0,068	0,223	2,02	0,047
UMUR	0,117	0,051	0,192	2,278	0,026
JK	1,356	0,891	0,132	1,522	0,132

Sumber : Hasil olah data, 2018

Dari tabel diatas dapat di uji hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

$H_0 : b_1 = 0$ Tidak ada pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

$H_1 : b_1 \neq 0$ ada pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, diperoleh nilai p -value hasil uji-t dari variabel sumber daya manusia sebesar 0,002. Dikarenakan nilai p -value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,002 > 0,05$), maka H1 diterima ; yang berarti ada pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₀ : $b_2 = 0$ Tidak ada sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₂: $b_2 \neq 0$ ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, diperoleh nilai p -value hasil uji-t dari variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,001. Dikarenakan nilai p -value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,001 < 0,05$), maka H2 diterima ; yang berarti ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₀ : $b_3 = 0$ Tidak ada pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₃ b₃ ≠ 0 ada pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 0,047. Dikarenakan nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,047 < 0,05$), maka H₃ diterima ; yang berarti ada pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.5.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari variabel independen yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,719 ^a	,518	,485	3,620

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0.485 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah mampu menjelaskan

variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 48,5% sedangkan sisanya 51,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar ketiga variabel independen dan dua variabel kontrol diatas.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b_1 adalah 0,266 yang berarti hubungan antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.}=0,002$ dengan *Level of Significant*= 5%, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh antara sumber daya manusia (H_1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian

kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan (Desianawati, Herawati, dan Sinarwati, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) dan Desianawati, Herawati, dan Sinarwati (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan tidak sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset

negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b_2 adalah 0,264 yang menunjukkan hubungan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.} = 0,001$ dengan *Level of Significant* = 5%, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh antara sistem pengendalian pengendalian intern (H_2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Menurut Sukmanirngum (2012) Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan pengendalian terutama atas pengeloaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik (Mahaputra dan Putra, 2014). Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data

dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014), Sukmaningrum (2012), dan Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.6.3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b_3 adalah 0,138 yang menunjukkan bahwa hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang positif. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.} = 0,047$ dengan *Level of*

Significant= 5%, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan (H_3) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Mahaputra dan Putra, 2014).

Adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan (Nugraheni dan Subaweh, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat sistem pengendalian Intern maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin bertambah umur maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa apapun jenis kelamin dari pegawai pemerintah tidak dapat mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Memaksimal pemanfaatan sistem pengendalian intern secara efektif dan pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan secara tepat dan lengkap untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti dalam mendapatkan data dari responden tidak dapat bertemu responden secara langsung dan hanya diperbolehkan untuk dititipkan karena kesibukan dari responden itu sendiri serta peraturan dari pemerintah bahwa dalam penelitian tidak diperbolehkan mengganggu jam kerja pegawai.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar memperluas lingkup objek penelitian yang meliputi beberapa SKPD di tiap Kabupaten/Kota.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel independen lain diluar variabel dalam penelitian ini, seperti pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah dan faktor-faktor lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Andreica, A., et all.2009.Information Systems for Financial and Administrative Management.Case study on Babes-Bolyai University.*Journal studia Europae*:h:59-76

- Azwar, S.2006. *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan.2017. "*BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Serahkan LHP LKPD Pada Kabupaten/Kota Se-DIY.*" <http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=9340>.(Diakses 3 November 2017).
- Chandra, A.F.2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Desianawati, K., N.T, Herawati, dan N. K, Sinarwati. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2* No 1.
- Dunia, F. A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19(Edisi Kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harvesi, A. 2005. "Standar for Internal Control in New York state Goverment." <http://www.osc.state.ny.us>. (diakses pada 15 Februari 2018).
- Hutapea, T. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Indriasari, D dan Ertambang, N. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Interen Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)." *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Pontianak
- Mahaputra, I P.U dan Putra,I.W. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8 (2)*: 230–244.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- . 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governace." *Jurnal 2*: 1–17.

- Nugraheni, Purwaniati, dan Subaweh, I. 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 13(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/180/permen-dagri-no-04-tahun-2008>. (diakses 03 November 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. www.menpan.go.id/rbkunwas/images/pedoman/pengawasan_Peraturan-Pemerintah-tahun-2008-060-08.pdf. (diakses 03 November 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf. (diakses 03 November 2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 *Tentang Standarisasi Nasional*. http://itjen.kemenperin.go.id/itjen/peraturan/PP_NO_102_2000.PDF. (diakses 15 Januari 2018).
- Rosalin, F. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Pada BLU di Kota Semarang." *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sudiaranti, N.M. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Thesis*. Universitas Udayana.
- Sukmaningrum, T. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Suwarjono. 2014. *Teori Akuntansi*. Ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2009. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan

Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi.” *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto Vol 18 No 1

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0366

0977/34

- Membaca Surat : Dari Surat Izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/1881/Kesbangpol/2018 Tanggal : 19 Februari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ARIEFSETYA DARMAWAN
No. Mhs/ NIM : 14312060
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta
Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Penanggungjawab : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Februari 2018 s/d 21 Mei 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ARIEFSETYA DARMAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21-02-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yk
4. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0553 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/1881/kesbangpol/2018
Tanggal : 19 Februari 2018
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ARIEFSETYA DARMAWAN
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 34010901060002
- 3 No. Telp/ HP : 081326616364

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- b. Lokasi : BKAD Kabupaten Bantul
- c. Waktu : 21 Februari 2018 s/d 21 Agustus 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 21 Februari 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



HENY ENDRAWATI, SP.MP.
NIP: 19710608 199803 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 691 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/1881/Kesbangpol/2018 Tanggal : 19 Februari 2018
Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ARIEFSETYA DARMAWAN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14312060
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Condongcatur Depok Sleman
Alamat Rumah : Tegalsari Purwosari Girimulyo Kulon Progo
No. Telp / HP : 081326616364
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
Lokasi : BKAD Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 19 Februari 2018 s/d 21 Mei 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 19 Februari 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BKAD Kab. Sleman
3. Dekan FE UII
4. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00167/II/2018

- Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/1881/Kesbangpol/2018, Tanggal: 19 Februari 2018, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **ARIEFSETYA DARMAWAN**
NIM / NIP : 14312060
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Lokasi : **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : 22 Februari 2018 s/d 24 Mei 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 21 Februari 2018

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0173/PEN/II/2018

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Nomor : 074/1881/Kesbangpol/2018 tanggal 19 Februari 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :
Nama : **Ariefsetya Darmawan NIM : 14312060**
Fakultas/Instansi : Ekonomi/Universitas Islam Indonesia
Alamat Instansi : Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Rumah : Tegalsari RT.07/ Rw.04, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"
Lokasi Penelitian : BKAD Kab.Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E.,M.Si.,Ph.D
Waktunya : Mulai tanggal : 26 Februari 2018 s/d 24 Mei 2018
Dengan ketentuan :

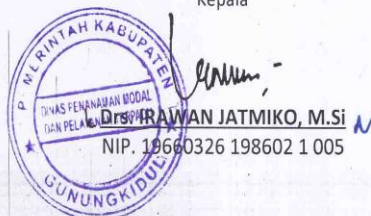
Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpapgungkidul@gmail.com.
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 26 Februari 2018

An. Bupati
Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul ;
5. Arsip.

Lampiran 2: Operasionalisasi Variabel

	Variabel	indikator	Indikator	Sumber
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Relevan	1)Menyusun laporan Keuangan sesuai SAP 2) <i>Feedback value</i> 3) <i>Predictive value</i> 4)Tepat waktu 5)Lengkap	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)
		2. Handal	6)Penyajian jujur 7)Handal 8)Dapat diverifikasi 9)Memenuhi kebutuhan pengguna 10) Netralitas	
		3. Dapat dibandingkan	11) Dapat dibandingkan	
		4. Dapat dipahami	12) Disusun dengan jelas sehingga dapat dipahami	
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan	1) Pemahaman teknis pekerjaan 2) Pemahaman siklus akuntansi 3) Pemahaman basis akrual 4) Upgrade pengetahuan dibidang akuntansi	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)
		2. Keahlian	5) Kemampuan membuat jurnal 6) Kemampuan memposting jurnal 7) Kemampuan menyusun dan menyajikan LRA, Neraca, LAK dan CALK 8) Kemampuan menyusun dan menyajikan laporan perubahan saldo anggran operasional dan laporan perubahan ekuitas	
		3. Sikap	9) Mengedepankan etika dan kode etik akuntansi 10) Menolak intervensi	

			11) Bekerja berdasar praktik yang diterima umum 12) Mendukung prinsip prinsip akuntansi	
3	Sistem pengendalian Intern Pemerintah	1. Lingkungan Pengendalian	1) Penetapan aturan dan standar etika 2) Standar kompetensi tugas dan fungsi 3) Pendelegasian wewenang 4) Tindakan yang tegas atas pelanggaran 5) Melakukan pemeriksaan 6) Penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)
		2. Penilaian Resiko	7) Identifikasi resiko 8) Analisis resiko	
		3. Kegiatan Pengendalian	9) Otorisasi 10) Implementasi kebijakan dan prosedur 11) Dokumentasi yang baik 12) Pemahaman tujuan dan kegiatan pengendalian 13) Pengembangan rencana dan pengamanan aset 14) Pengendalian fisik atas aset	
		4. Informasi dan Komunikasi	15) Menyediakan informasi yang tepat untuk dilakukan tindakan korektif 16) Pelaksanaan saluran komunikasi berkelanjutan secara terbuka dan efektif	
4	Standar Akuntansi	1. PSAP 01	1) Berbasis akrual	PP Nomor 71 Tahun 2010

Pemerintah	Penyajian Laporan Keuangan	2) Komponen laporan keuangan	tentang SAP berbasis akrual
	2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran	3) Berbasis kas 4) Isi laporan realisasi anggaran	
	3. PSAP 03 Laporan Arus Kas	5) Penyajian laporan arus kas 6) Metode langsung dalam pelaporan	
	4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan	7) Penyajian langsung CaLK 8) Susunan dalam CaLK	
	5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan	9) Pengakuan persediaan 10) Penilaian persediaan	
	6. PSAP 06 Akuntansi Investasi	11) Pengakuan investasi 12) Klasifikasi investasi	
	7. PSAP 07 Aset Tetap	13) Klasifikasi aset tetap 14) Penilaian dan pencatatan aset tetap	
	8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	15) Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan 16) Perlakuan akuntansi konstruksi	

	9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban	17) Pengakuan kewajiban 18) Pengukuran kewajiban	
	10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan	19) Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan	

		11. PSAP 11 Laporan Konsolidasi	20) Penyajian laporan keuangan konsolidasian	
		12. PSAP 12 Laporan Operasional	21) Periode pelaporan keuangan 22) Informasi dalam laporan operasional	

Lampiran 3 : Kuisisioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Lampiran : Kuisisioner Penelitian

Kepada Yth Bapak/Ibu Pegawai

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di Kabupaten

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun tugas akhir (Skripsi) sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia maka dengan ini saya :

Nama : Ariefsetya Darmawan

Nim : 14312060

Jurusan / Fakultas : Akuntansi / Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Dengan ini bermaksud melakukan penelitian mengenai “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk itu saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan dalam kuisisioner ini secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian. Kuisisioner ini nantinya semata-mata untuk keperluan ilmiah dan saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan kuisisioner ini. Atas kerjasama, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuisisioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Dosen pembimbing

Hormat saya

Johan Arifin

Ariefsetya Darmawan

A. Identitas Responden

Nama Instansi :
.....
Nama Responden :.....(jika tidak keberatan)
Umur :
.....
Jenis kelamin :
.....
Jabatan :
.....
Pendidikan :
.....
Pernahkah Bapak/Ibu/Saudara membuat Laporan Keuangan ?*)
Pernah / Tidak Pernah

*)coret yang tidak perlu

B. Petunjuk pengisian Kuisioner

Berikut ini merupakan pernyataan pernyataan yang mewakili pendapat pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Bapak/Ibu. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi checklist (v) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

Penilaian :

- STS : Sangat Tidak Setuju : Nilai 1
- TS : Tidak Setuju : Nilai 2
- N : Netral : Nilai 3
- S : Setuju : Nilai 4
- SS : Sangat Setuju : Nilai 5

Catataan : Mengisi pilihan netral jika Bapak/Ibu/Saudara tidak mengetahui atau memahami pertanyaan yang dimaksud atau belum pernah mengalami.

a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Relevan						
1	Laporan keuangan yang disusun oleh instansi saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
2	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (<i>feedback value</i>)					
3	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>)					
4	Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.					
5	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja lengkap dan mencakup semua informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.					
Andal						
6	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
7	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
8	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja teruji kebenarannya					
9	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja telah memenuhi kebutuhan para					

	pengguna dari laporan keuangan pemerintah					
10	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					
Dapat Dibandingkan						
11	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
12	Dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan					
Dapat dipahami						
13	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pernyataan tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia		Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Pengetahuan (<i>knowledge</i>)						
1	Saya memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang baik					
2	Saya memahami siklus akuntansi dengan baik.					
3	Saya memahami Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik					
Keahlian (<i>skill</i>)						
4	Saya mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan baik					
5	Saya mampu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dengan baik.					
6	Saya mampu menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas, Laporan					

	Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan baik					
Perilaku (<i>attitude</i>)						
7	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					
8	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan					
9	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum.					
10	Saya mendukung penerpaan prinsip-prinsip akuntansu dan estimasi yang konservatif					

c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pernyataan tentang Sistem Pengendalian Internal		Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Lingkungan Pengendalian						
1	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai					
2	Instansi telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi					
3	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan Instansi pemerintah					
4	Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur atau aturan perilaku.					
5	Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang					
6	Pimpinan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern					
Penilaian Resiko						
7	Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya					

	pelanggaran terhadap sistem akuntansi					
8	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Aktivitas Pengendalian						
9	Semua transaksi yang dientri dan diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi					
10	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik					
11	Pengeluaran uang pada Instansi selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas					
12	Pegawai dan atas telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian					
13	Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamnan aset infrastruktur					
14	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan					
Informasi dan Komunikasi						
15	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.					
16	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.					

d. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.		Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan						
1	Instansi di tempat saya bekerja selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, ekuitas dan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, pendapatan belanja dan pembiayaan.					
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran						
2	Instansi di tempat saya bekerja selalu menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran					
3	Instansi di tempat saya bekerja selalu Mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto dan mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah					
4	Penerimaan pembiayaan diakuiada saat diterima pada kas rekening umum daerah					
PSAP 03 Laporan Arus Kas						
5	Instansi di tempat saya bekerja selalu menyusun/menyaaajikan laporan arus kas sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah dalam laporan arus kas.					
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan						
6	Laporan keuangan disusun/disajikan terdapat catatan atas laporan keuangan pada setiap periode dan memberikan informasi yang lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan.					
PSAP 05 Akuntansi Persediaan						
7	Instansi di tempat saya bekerja selalu mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.					
8	Pencatatan persediaan selalu dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi					
PSAP 06 Akuntansi Investasi						
9	Instansi di tempat saya bekerja selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi dimasa datang dapat diperoleh dan					

	nilai perolehan investasi dapat diukur					
PSAP 07 Aset Tetap						
10	Instansi di tempat saya bekerja selalu mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya serta mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya.					
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan						
11	Instansi di tempat saya bekerja selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.					
12	Instansi di tempat saya bekerja selalu memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan					
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban						
13	Mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau saat kewajiban timbul serta mencatat kewajiban sebesar nominal.					
PSAP 10 Koreksi Kesalahan						
14	Instansi di tempat saya bekerja selalu melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP).					
PSAP 11 Laporan Konsolidasi						
15	Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas.					
PSAP 12 Laporan Operasional						
16	Instansi di tempat saya bekerja selalu menyusun dan menyajikan laporan operasional dan terdapat informasi tentang kegiatan operasional kerja yang mencakup pendapatan, beban, surplus/defisit operasional.					

Lampiran 5 : Reliabilitas dan Validitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,768	14

Correlations

		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
A1	Pearson Correlation	1	,435*	,420**	,430**	,608**	,428**	,557**	,374**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A2	Pearson Correlation	,435*	1	,697**	,464**	,545**	,380**	,337**	,230*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,001	,002	,040
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A3	Pearson Correlation	,420*	,697*	1	,421**	,501**	,329**	,384**	,254*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,003	,000	,023

	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A4	Pearson Correlation	,430*	,464*	,421**	1	,556**	,468**	,486**	,423**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A5	Pearson Correlation	,608*	,545*	,501**	,556**	1	,604**	,672**	,384**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A6	Pearson Correlation	,428*	,380*	,329**	,468**	,604**	1	,542**	,454**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,003	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A7	Pearson Correlation	,557*	,337*	,384**	,486**	,672**	,542**	1	,555**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A8	Pearson Correlation	,374*	,230*	,254*	,423**	,384**	,454**	,555**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,040	,023	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A9	Pearson Correlation	,458*	,492*	,432**	,470**	,640**	,561**	,530**	,313**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,005
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A10	Pearson Correlation	,616*	,449*	,352**	,562**	,524**	,611**	,601**	,469**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A11	Pearson Correlation	,476*	,496*	,344**	,503**	,580**	,542**	,519**	,398**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A12	Pearson Correlation	,679*	,298*	,399**	,410**	,428**	,379**	,436**	,321**
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,000	,000	,001	,000	,004
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
A13	Pearson Correlation	,525*	,592*	,545**	,471**	,570**	,558**	,462**	,405**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
LKPD	Pearson Correlation	,742*	,685*	,656**	,709**	,813**	,724**	,754**	,584**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

Correlations

		A9	A10	A11	A12	A13	LKPD
A1	Pearson Correlation	,458	,616**	,476**	,679**	,525**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80

A2	Pearson Correlation	,492**	,449	,496**	,298**	,592**	,685**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,007	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A3	Pearson Correlation	,432**	,352**	,344	,399**	,545**	,656**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,002	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A4	Pearson Correlation	,470**	,562**	,503**	,410	,471**	,709**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A5	Pearson Correlation	,640**	,524**	,580**	,428**	,570	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A6	Pearson Correlation	,561**	,611**	,542**	,379**	,558**	,724
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A7	Pearson Correlation	,530**	,601**	,519**	,436**	,462**	,754**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A8	Pearson Correlation	,313**	,469*	,398*	,321**	,405**	,584**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,004	,000	,000

	N	80	80	80	80	80	80
A9	Pearson Correlation	1**	,452**	,661**	,468**	,620**	,760**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A10	Pearson Correlation	,452**	1**	,541**	,561**	,520**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A11	Pearson Correlation	,661**	,541**	1**	,495**	,496**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A12	Pearson Correlation	,468**	,561**	,495**	1**	,620**	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
A13	Pearson Correlation	,620**	,520**	,496**	,620**	1**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80
LKPD	Pearson Correlation	,760**	,765**	,749**	,687**	,781**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		n	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,719	11

Correlations

		B1	B2	B3	B4	B5	B6
B1	Pearson Correlation	1	,612**	,441**	,334**	,399**	,416**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
B2	Pearson Correlation	,612**	1	,791**	,712**	,723**	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
B3	Pearson Correlation	,441**	,791**	1	,755**	,779**	,753**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
B4	Pearson Correlation	,334**	,712**	,755**	1	,948**	,800**

	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
B5	Pearson Correlation	,399**	,723**	,779**	,948**	1	,821**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80
B6	Pearson Correlation	,416**	,759**	,753**	,800**	,821**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80
B7	Pearson Correlation	,393**	,392**	,328**	,448**	,419**	,467**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
B8	Pearson Correlation	,401**	,343**	,275*	,481**	,513**	,458**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,014	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
B9	Pearson Correlation	,345**	,325**	,365**	,503**	,560**	,369**
	Sig. (2-tailed)	,002	,003	,001	,000	,000	,001
	N	80	80	80	80	80	80
B10	Pearson Correlation	,210	,383**	,408**	,560**	,577**	,507**
	Sig. (2-tailed)	,061	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80

SDM	Pearson Correlation	,409**	,667**	,664**	,734**	,762**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80

Correlations

		B7	B8	B9	B10	SDM
B1	Pearson Correlation	,393	,401**	,345**	,210**	,409**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,061	,000
	N	80	80	80	80	80
B2	Pearson Correlation	,392**	,343	,325**	,383**	,667**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,003	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
B3	Pearson Correlation	,328**	,275**	,365	,408**	,664**
	Sig. (2-tailed)	,003	,014	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
B4	Pearson Correlation	,448**	,481**	,503**	,560	,734**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
B5	Pearson Correlation	,419**	,513**	,560**	,577**	,762
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000

	N	80	80	80	80	80
B6	Pearson Correlation	,467**	,458**	,369**	,507**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
B7	Pearson Correlation	1**	,449**	,474**	,358**	,558**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000
	N	80	80	80	80	80
B8	Pearson Correlation	,449**	1**	,767**	,647**	,630**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
B9	Pearson Correlation	,474**	,767**	1**	,748**	,633**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80
B10	Pearson Correlation	,358	,647**	,748**	1**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80
SDM	Pearson Correlation	,558**	,630**	,633**	,640**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,689	17

Correlations

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
C1	Pearson Correlation	1	,426**	,620*	,389**	,424*	,467**	,339**	,495*	,408*	,487**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C2	Pearson Correlation	,426**	1	,558*	,269*	,301*	,272*	,229*	,421*	,202	,222*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,016	,007	,014	,041	,000	,073	,048
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C3	Pearson Correlation	,620**	,558**	1	,488**	,482*	,602**	,550**	,605*	,284*	,360**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,011	,001

	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C4	Pearson Correlation	,389**	,269*	,488*	1	,237*	,395**	,517**	,436*	,298*	,373**
	Sig. (2-tailed)	,000	,016	,000		,034	,000	,000	,000	,007	,001
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C5	Pearson Correlation	,424**	,301**	,482*	,237*	1	,683**	,363**	,296*	,279*	,388**
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,034		,000	,001	,008	,012	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C6	Pearson Correlation	,467**	,272*	,602*	,395**	,683*	1	,547**	,414*	,323*	,444**
	Sig. (2-tailed)	,000	,014	,000	,000	,000		,000	,000	,003	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C7	Pearson Correlation	,339**	,229*	,550*	,517**	,363*	,547**	1	,683*	,317*	,347**
	Sig. (2-tailed)	,002	,041	,000	,000	,001	,000		,000	,004	,002
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C8	Pearson Correlation	,495**	,421**	,605*	,436**	,296*	,414**	,683**	1	,423*	,457**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,008	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C9	Pearson Correlation	,408**	,202	,284*	,298**	,279*	,323**	,317**	,423*	1	,409**

	Sig. (2-tailed)	,000	,073	,011	,007	,012	,003	,004	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C10	Pearson Correlation	,487**	,222*	,360*	,373**	,388*	,444**	,347**	,457*	,409*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,048	,001	,001	,000	,000	,002	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C11	Pearson Correlation	,492**	,165	,208	,162	,352*	,255*	,223*	,271*	,502*	,528**
	Sig. (2-tailed)	,000	,143	,064	,151	,001	,022	,047	,015	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C12	Pearson Correlation	,508**	,288**	,459*	,186	,342*	,284*	,320**	,456*	,321*	,444**
	Sig. (2-tailed)	,000	,010	,000	,099	,002	,011	,004	,000	,004	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C13	Pearson Correlation	,561**	,480**	,563*	,140	,316*	,357**	,424**	,620*	,250*	,507**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,217	,004	,001	,000	,000	,025	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C14	Pearson Correlation	,443**	,252*	,481*	,280*	,184	,400**	,467**	,487*	,210	,565**
	Sig. (2-tailed)	,000	,024	,000	,012	,102	,000	,000	,000	,062	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

C15	Pearson Correlation	,585**	,436**	,714*	,513**	,381*	,568**	,476**	,458*	,371*	,340**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,002
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C16	Pearson Correlation	,365**	,309**	,572*	,464**	,171	,392**	,602**	,500*	,299*	,378**
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,000	,000	,130	,000	,000	,000	,007	,001
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
SPI	Pearson Correlation	,653**	,404**	,711*	,576**	,480*	,629**	,684**	,650*	,437*	,580**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Correlations

		C11	C12	C13	C14	C15	C16	SPI
C1	Pearson Correlation	,492	,508**	,561**	,443**	,585**	,365**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C2	Pearson Correlation	,165**	,288	,480**	,252*	,436**	,309*	,404*
	Sig. (2-tailed)	,143	,010	,000	,024	,000	,005	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80

C3	Pearson Correlation	,208**	,459**	,563	,481**	,714**	,572**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,064	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C4	Pearson Correlation	,162**	,186*	,140**	,280	,513*	,464**	,576**
	Sig. (2-tailed)	,151	,099	,217	,012	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C5	Pearson Correlation	,352**	,342**	,316**	,184*	,381	,171**	,480**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,004	,102	,000	,130	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C6	Pearson Correlation	,255**	,284*	,357**	,400**	,568**	,392	,629**
	Sig. (2-tailed)	,022	,011	,001	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C7	Pearson Correlation	,223**	,320*	,424**	,467**	,476**	,602**	,684
	Sig. (2-tailed)	,047	,004	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C8	Pearson Correlation	,271**	,456**	,620**	,487**	,458**	,500**	,650**
	Sig. (2-tailed)	,015	,000	,000	,000	,000	,000	,000

	N	80	80	80	80	80	80	80
C9	Pearson Correlation	,502**	,321	,250*	,210**	,371*	,299**	,437**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,025	,062	,001	,007	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C10	Pearson Correlation	,528**	,444*	,507**	,565**	,340**	,378**	,580**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	,001	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C11	Pearson Correlation	1**	,604	,490	,386	,344**	,208*	,465*
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,002	,064	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C12	Pearson Correlation	,604**	1**	,705**	,468	,385**	,384*	,618**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C13	Pearson Correlation	,490**	,705**	1**	,660	,486**	,451**	,638**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C14	Pearson Correlation	,386**	,468*	,660**	1*	,548	,461**	,673**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C15	Pearson Correlation	,344**	,385**	,486**	,548**	1**	,486**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
C16	Pearson Correlation	,208**	,384**	,451**	,461**	,486	1**	,688**
	Sig. (2-tailed)	,064	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
SPI	Pearson Correlation	,465**	,618**	,638**	,673**	,742**	,688**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,703	17

Correlations

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
D1	Pearson Correlation	1	,553**	,535*	,331**	,626*	,516**	,498**	,417*	,381*	,468**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D2	Pearson Correlation	,553*	1	,633*	,421**	,606*	,452**	,375**	,346*	,389*	,559**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,002	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D3	Pearson Correlation	,535*	,633**	1	,517**	,668*	,571**	,582**	,537*	,501*	,732**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D4	Pearson Correlation	,331 [*]	,421 ^{**}	,517 [*]	1	,432 [*]	,531 ^{**}	,659 ^{**}	,537 [*]	,392 [*]	,223 [*]
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,047
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D5	Pearson Correlation	,626 [*]	,606 ^{**}	,668 [*]	,432 ^{**}	1	,659 ^{**}	,520 ^{**}	,528 [*]	,477 [*]	,556 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D6	Pearson Correlation	,516 [*]	,452 ^{**}	,571 [*]	,531 ^{**}	,659 [*]	1	,577 ^{**}	,532 [*]	,473 [*]	,385 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D7	Pearson Correlation	,498 [*]	,375 ^{**}	,582 [*]	,659 ^{**}	,520 [*]	,577 ^{**}	1	,802 [*]	,578 [*]	,479 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D8	Pearson Correlation	,417 [*]	,346 ^{**}	,537 [*]	,537 ^{**}	,528 [*]	,532 ^{**}	,802 ^{**}	1	,647 [*]	,647 ^{**}

	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D9	Pearson Correlation	,381*	,389**	,501*	,392**	,477*	,473**	,578**	,647*	1	,609**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D10	Pearson Correlation	,468*	,559**	,732*	,223*	,556*	,385**	,479**	,647*	,609*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,047	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D11	Pearson Correlation	,435*	,359**	,426*	,491**	,563*	,650**	,576**	,666*	,492*	,459**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D12	Pearson Correlation	,441*	,325**	,422*	,550**	,485*	,585**	,608**	,561*	,374*	,371**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,001
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D13	Pearson Correlation	,370*	,413**	,671*	,254*	,396*	,384**	,435**	,501*	,502*	,720**

	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,023	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D14	Pearson Correlation	,632 [*]	,562 ^{**}	,628 [*]	,420 ^{**}	,648 [*]	,633 ^{**}	,461 ^{**}	,512 [*]	,555 [*]	,541 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D15	Pearson Correlation	,583 [*]	,374 ^{**}	,342 [*]	,379 ^{**}	,553 [*]	,635 ^{**}	,376 ^{**}	,386 [*]	,368 [*]	,268 [*]
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,002	,001	,000	,000	,001	,000	,001	,016
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D16	Pearson Correlation	,663 [*]	,555 ^{**}	,704 [*]	,197	,646 [*]	,451 ^{**}	,435 ^{**}	,402 [*]	,449 [*]	,687 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,079	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PSA P	Pearson Correlation	,653 [*]	,605 ^{**}	,716 [*]	,559 ^{**}	,721 [*]	,686 ^{**}	,677 ^{**}	,683 [*]	,640 [*]	,670 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Correlations

		D11	D12	D13	D14	D15	D16	PSAP
D1	Pearson Correlation	,435	,441**	,370**	,632**	,583**	,663**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D2	Pearson Correlation	,359**	,325	,413**	,562**	,374**	,555**	,605**
	Sig. (2-tailed)	,001	,003	,000	,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D3	Pearson Correlation	,426**	,422**	,671	,628**	,342**	,704**	,716**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D4	Pearson Correlation	,491**	,550**	,254**	,420	,379**	,197**	,559**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,023	,000	,001	,079	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D5	Pearson Correlation	,563**	,485**	,396**	,648**	,553	,646**	,721**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80

D6	Pearson Correlation	,650**	,585**	,384**	,633**	,635**	,451	,686**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D7	Pearson Correlation	,576**	,608**	,435**	,461**	,376**	,435**	,677
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D8	Pearson Correlation	,666**	,561**	,501**	,512**	,386**	,402**	,683**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D9	Pearson Correlation	,492**	,374**	,502**	,555**	,368**	,449**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D10	Pearson Correlation	,459**	,371**	,720**	,541*	,268**	,687**	,670**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,016	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D11	Pearson Correlation	1**	,880**	,481**	,489**	,595**	,300**	,682**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,007	,000

	N	80	80	80	80	80	80	80
D12	Pearson Correlation	,880**	1**	,472**	,377**	,561**	,302**	,645**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,000	,007	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D13	Pearson Correlation	,481**	,472**	1**	,451*	,403**	,630**	,566**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D14	Pearson Correlation	,489**	,377**	,451**	1**	,644**	,678**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D15	Pearson Correlation	,595**	,561**	,403**	,644**	1**	,577**	,586**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
D16	Pearson Correlation	,300**	,302**	,630**	,678	,577**	1**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,007	,007	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
PSAP	Pearson Correlation	,682**	,645**	,566**	,681**	,586**	,677**	1**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-25 tahun	3	3,8	3,8	3,8
26-30 tahun	10	12,5	12,5	16,3
31-35 tahun	12	15,0	15,0	31,3
36-40 tahun	15	18,8	18,8	50,0
41-45 tahun	15	18,8	18,8	68,8
46-50 tahun	14	17,5	17,5	86,3
51-55 tahun	8	10,0	10,0	96,3
56-60 tahun	3	3,8	3,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

JK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	31	38,8	38,8	38,8
P	49	61,3	61,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D3	5	6,3	6,3	6,3
S1	59	73,8	73,8	80,0
S2	7	8,8	8,8	88,8
SLT A	9	11,3	11,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 5 : Uji Regresi

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PSAP, JK, Umur, SPI, SDM ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: LKPD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,719 ^a	,518	,485	3,620	1,658

a. Predictors: (Constant), PSAP, JK, Umur, SPI, SDM

b. Dependent Variable: LKPD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1040,427	5	208,085	15,883	,000 ^b
	Residual	969,460	74	13,101		
	Total	2009,888	79			

a. Dependent Variable: LKPD

b. Predictors: (Constant), PSAP, JK, Umur, SPI, SDM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,481	5,489		2,274	,026
	Umur	,117	,051	,192	2,278	,026
	JK	1,356	,891	,132	1,522	,132
	SDM	,266	,084	,319	3,154	,002
	SPI	,264	,072	,367	3,641	,001
	PSAP	,138	,068	,223	2,020	,047

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Umur	,918	1,090
	JK	,869	1,151
	SDM	,638	1,567
	SPI	,640	1,562
	PSAP	,535	1,869

a. Dependent Variable: LKPD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Umur	JK	SDM
1	1	5,852	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,084	8,350	,00	,03	,71	,01
	3	,043	11,707	,00	,57	,00	,07
	4	,011	23,290	,01	,08	,06	,76
	5	,006	30,497	,22	,08	,00	,04
	6	,004	38,762	,77	,23	,22	,12

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		SPI	PSAP
1	1	,00	,00
	2	,00	,00
	3	,01	,01
	4	,25	,04
	5	,12	,81
	6	,62	,13

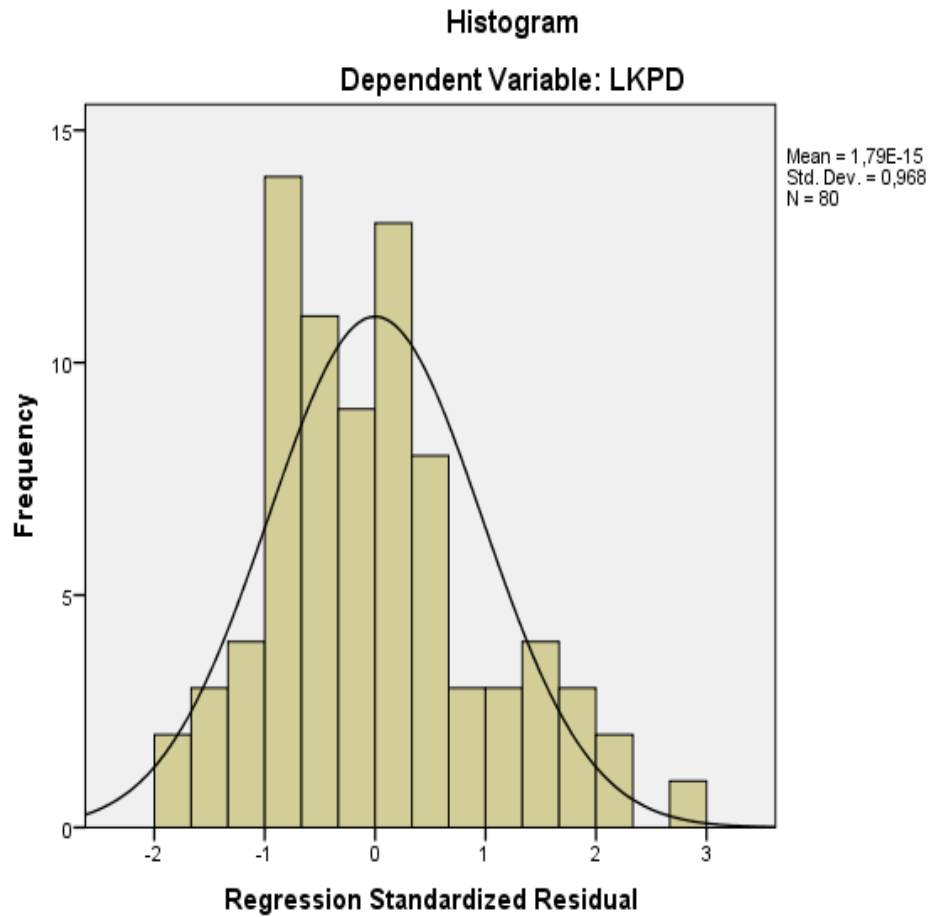
a. Dependent Variable: LKPD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	n
Predicted Value	45,10	64,08	55,34	3,629	80
Std. Predicted Value	-2,822	2,408	,000	1,000	80
Standard Error of Predicted Value	,576	2,400	,939	,319	80
Adjusted Predicted Value	44,23	63,97	55,33	3,629	80
Residual	-6,235	10,400	,000	3,503	80
Std. Residual	-1,723	2,873	,000	,968	80
Stud. Residual	-1,762	2,916	,001	1,006	80
Deleted Residual	-6,530	10,709	,004	3,794	80
Stud. Deleted Residual	-1,788	3,078	,006	1,021	80
Mahal. Distance	1,014	33,746	4,938	5,002	80
Cook's Distance	,000	,117	,014	,024	80
Centered Leverage Value	,013	,427	,063	,063	80

a. Dependent Variable: LKPD

Charts



Lampiran Kolmogorov

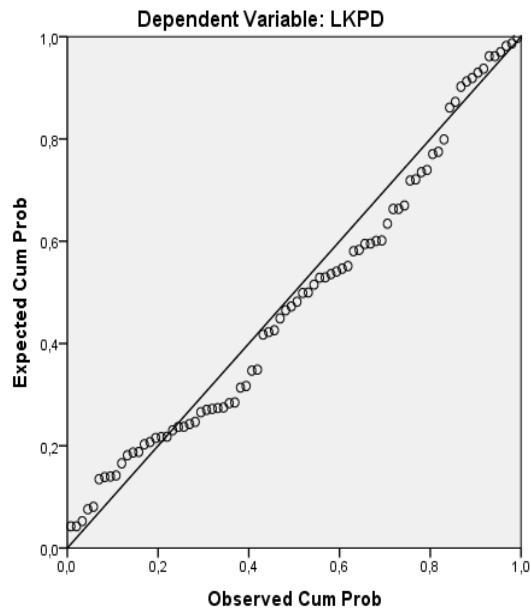
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,63708492
	Absolute	,080
Most Extreme Differences	Positive	,080
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,719
Asymp. Sig. (2-tailed)		,680

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

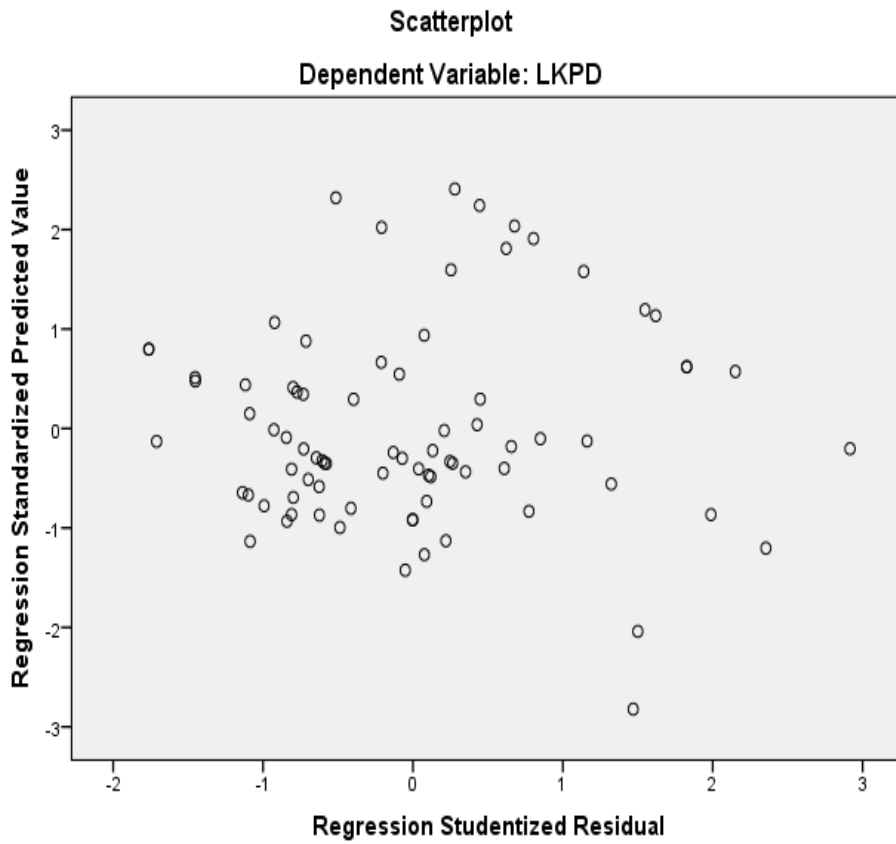
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran Uji glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,668	3,286		,812	,419
SDM	,085	,051	,238	1,685	,096
SPI	,001	,043	,002	,017	,986
PSAP	-,057	,041	-,214	-1,384	,170
Umur	,018	,031	,068	,579	,564
JK	-,170	,533	-,039	-,318	,752



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,50309160
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,865
Asymp. Sig. (2-tailed)		,442

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.